

**PENGEMBANGAN POTENSI WISATA DALAM KERANGKA
PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA
(Studi di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

NIKEN AYU RAHMA SUDARKO

NIT. 21303803

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

Kalurahan Wonokerto holds significant potential in natural, cultural, and agricultural tourism; however, its development remains suboptimal due to limited infrastructure, low human resource capacity, and the lack of integration with the agrarian reform program. Agrarian reform does not only focus on land tenure restructuring but also opens opportunities for access restructuring through the utilization of productive sectors such as tourism. This study aims to analyze the development of tourism potential within the framework of access restructuring in agrarian reform, identify stakeholder roles, and examine the challenges and solutions encountered. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through observation, interviews, and documentation.

The results showed that the four attractions in Wonokerto sub-district have a great opportunity to be developed through edu-tourism, agro-tourism, and cultural tourism. Stakeholders involved such as Wonokerto Village Government, Tourism Awareness Group, Sleman Regency Tourism Office, Sleman Regency Land Office, and the community collaborate in institutional strengthening and tourism training. The obstacles faced include low understanding of agrarian reform, limited community participation, inadequate infrastructure, and lack of management innovation. Various solutions have been implemented, such as integrated training, institutional assistance, accessibility improvements, provision of public facilities, and innovation workshops based on local potential. The integration of tourism development within the framework of agrarian reform access arrangement has great potential to encourage inclusive and sustainable community empowerment.

Keywords: *tourism potential development, agrarian reform, access restructuring, community empowerment.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT.....	ix
INTISARI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoritis.....	13
C. Kerangka Pemikiran	31
D. Pertanyaan Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Format Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Operasional Penelitian	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
A. Kondisi Eksisting Kalurahan Wonokerto sebagai Lokasi Reforma Agraria	40
BAB V PENGEMBANGAN POTENSI WISATA	48
A. Potensi Wisata.....	48
B. Program Pengembangan Wisata.....	66
C. Harapan Masyarakat	71
D. Strategi Yang Dapat Dilakukan	72

BAB VI PERAN <i>STAKEHOLDER</i>	78
A. <i>Stakeholder</i> Dalam Pengembangan Potensi Wisata	78
B. Peran <i>Stakeholder</i>	80
C. Manfaat Kolaborasi Antar <i>Stakeholder</i>	85
BAB VII KENDALA DAN SOLUSI	88
A. Kendala Dalam Pengembangan Potensi Wisata	88
B. Solusi Untuk Mengatasi Kendala	93
BAB VIII PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal karena memiliki keunggulan serta keberagaman di bidang pariwisata. Keindahan alam yang disuguhkan ini terbentang dari sabang sampai merauke dengan keberagaman budaya, adat istiadat yang dapat membuat wisatawan terpikat, tidak hanya wisatawan lokal tetapi wisatawan dari mancanegara ikut penasaran dan terkesima (Andina, 2021:28). Sektor pariwisata juga memiliki peran penting dalam membentuk citra positif suatu negara. Ketika suatu negara berhasil menghadirkan pengalaman wisata yang mengesankan bagi para pengunjung, hal ini dapat membangun citra positif di tingkat global. Citra baik tersebut tidak hanya mencerminkan popularitas destinasi wisata, tetapi juga menunjukkan keramahan masyarakat, keberagaman budaya, serta keindahan alam yang dimiliki. Faktor-faktor ini berperan dalam membentuk pandangan dunia terhadap negara tersebut, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap investasi asing, hubungan diplomatik, dan dukungan dari komunitas internasional (Adnan, 2023:82-83).

Seiring waktu, masyarakat semakin berupaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Hal tersebut sangat berdampak baik yang mana pengembangan potensi wisata yang ada disekitar dapat terintegrasi sehingga memunculkan keaslian desa yang tentunya diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kelangsungan ekonomi atau pendapatan Masyarakat (Ashaab, 2024:109). Pengembangan wisata sangat diperlukan terutama dengan menerapkan pendekatan yang berfokus pada keseimbangan antara pelestarian alam, kemudian pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat melalui konsep pariwisata berkelanjutan. Dengan demikian konsep ini merupakan salah satu pilar penting yang digunakan sebagai upaya untuk membangun destinasi wisata yang tidak

hanya menarik secara peluang pendapatan melainkan juga berkelanjutan dilingkungan sosial masyarakat (Saputra, 2024:208).

Di sisi lain, reforma agraria menjadi salah satu kebijakan penting pemerintah dalam menata kembali struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah secara adil. Penataan akses reforma agraria bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya produktif. Dalam konteks pengembangan wisata, reforma agraria dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan mendukung pembangunan ekonomi lokal tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Reforma agraria adalah kebijakan yang bertujuan untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih berkeadilan melalui penataan aset maupun penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Selain fokus pada aspek kepemilikan tanah, reforma agraria juga mencakup peningkatan akses terhadap berbagai sumber daya yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat (Sulistyaningsih, 2021:59).

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 62 Tahun 2023 pasal 56 dalam kegiatan reforma agraria, penataan akses reforma merupakan pengelolaan akses melalui pemberdayaan masyarakat harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan bagi mereka yang belum memiliki tanah sebagai sumber penghidupan ekonomi. Kepastian dalam pengelolaan akses diperlukan untuk menjamin tersedianya akses bagi setiap individu dalam proses pemanfaatan tanah yang dikelola. Berbagai upaya pemerintah dalam mengatur akses melalui pemberdayaan masyarakat perlu diseimbangkan dengan peningkatan keterampilan masyarakat agar manfaatnya lebih optimal (Utomo, 2021:209).

Adapun sebagian besar tanah di Kalurahan Wonokerto telah bersertifikat melalui program PRONA pada tahun 2016 dan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pada tahun 2018. Dengan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, aset pertanahan di desa ini tertata

dengan baik. Oleh sebab itu, pada tahun 2023, Kalurahan Wonokerto terpilih sebagai lokasi penataan akses reforma agraria oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Program ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk mendukung potensi desa.

Kalurahan Wonokerto merupakan desa yang terletak di Kaki Gunung Merapi serta terkenal dengan tanaman salak. Kalurahan Wonokerto ini memiliki potensi wisata yakni Panorama Merapi. Adapun Wonokerto telah menginisiasi berbagai program berbasis alam dan budaya. Dusun-dusun di Kalurahan Wonokerto memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam dan menarik. Desa Wisata Tunggularum menawarkan daya tarik wisata alam dengan pemandangan Gunung Merapi, serta pengalaman budaya melalui interaksi dengan masyarakat lokal dan pertunjukan seni. Desa wisata Gondoarum dikenal dengan desa wisata yang menawarkan pengalaman agrowisata salak pondoh, kegiatan *outbond*, dan kuliner tradisional., sementara Desa wisata Jakagarong mengedepankan agrowisata dan budaya lokal. Desa Wisata Sangurejo memiliki potensi wisata air yang menarik, dengan Embung Kaliaji sebagai destinasi utama. Setiap desa memiliki karakteristik unik yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menarik wisatawan.

Optimalisasi wisata di Kalurahan Wonokerto berarti memaksimalkan potensi yang ada untuk menjadikan desa ini sebagai destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas, seperti jalan dan fasilitas umum, serta penyediaan layanan yang berkualitas untuk pengunjung. Dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan keunikan geografis yang dimiliki, desa ini dapat menarik lebih banyak wisatawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Selain itu, optimalisasi wisata juga melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan workshop. Ini penting agar masyarakat setempat dapat mengelola dan mempromosikan atraksi wisata dengan lebih efektif, serta memberikan pelayanan yang memuaskan

kepada pengunjung. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, optimalisasi wisata tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian, membuka peluang usaha baru, dan menjaga kelestarian lingkungan..

Kegiatan penataan akses reforma agraria di Kalurahan Wonokerto telah dimulai sejak tahun 2023 dengan program "Sekolah Cabai," yang berfokus pada peningkatan sektor pertanian dan kini memasuki fase 2 pada tahun 2024. Selain itu, di Kalurahan Wonokerto juga dilaksanakan penataan akses baru yang berfokus pada peningkatan pada sektor wisatanya yang saat ini dilaksanakan dan baru ditahap fase 1 untuk pendataan subjeknya pada akhir tahun 2024. Mengingat Kalurahan Wonokerto memiliki potensi wisata yang besar dengan kondisi geografis yang mendukung, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji bagaimana pengembangan wisata yang menjadi bagian dari penataan akses reforma agraria. Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa optimalisasi wisata tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi juga selaras dengan prinsip keberlanjutan dan pemerataan manfaat dari reforma agraria.

Pengembangan wisata untuk mendukung reforma agraria harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan, baik dari segi lingkungan maupun sosial. Wisata yang berkembang pesat tanpa perencanaan yang matang dapat menimbulkan dampak negatif, seperti degradasi lingkungan, perubahan sosial budaya, serta konflik kepentingan di tingkat lokal. Oleh karena itu, pengelolaan wisata di Wonokerto harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta memastikan bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat setempat.

Untuk mengembangkan potensi wisata di Kalurahan Wonokerto, diperlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pendampingan bagi pengurus desa wisata dan masyarakat setempat sangat penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan dan promosi destinasi wisata. Pelatihan dan workshop dapat membantu

masyarakat memahami cara mengelola atraksi wisata, serta meningkatkan keterampilan dalam pelayanan dan pemasaran.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menganalisis potensi wisata di Kalurahan Wonokerto dalam kerangka penataan akses reforma agraria. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi wisata yang dapat dikembangkan, pihak yang terlibat, kendala yang mungkin muncul, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan wisata yang mendukung penataan akses reforma agraria sehingga bisa menjadi salah satu instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengembangan potensi wisata dalam kerangka penataan akses reforma agraria di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman?
2. *Stakeholder* mana saja yang terlibat dan apa perannya dalam pengembangan potensi wisata dalam kerangka penataan akses reforma agraria di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman?
3. Apa kendala dan solusi dalam pengembangan potensi wisata dalam kerangka penataan akses reforma agraria di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui pengembangan potensi wisata dalam kerangka penataan akses reforma agraria di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui *Stakeholder* mana saja yang terlibat serta perannya dalam pengembangan potensi wisata dalam kerangka penataan akses

reforma agraria di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.

3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pengembangan potensi wisata dalam kerangka penataan akses reforma agraria di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Sosial (Masyarakat)

Sebagai bahan masukan sekaligus memberikan pemahaman mengenai pentingnya kontribusi aktif dalam pengembangan potensi wisata di daerah agar dapat memaksimalkan potensi wisata yang ada di daerah tersebut.

2. Praktis

- a. Pemerintahan Kalurahan

Sebagai bahan rekomendasi yang mendorong pemberdayaan masyarakat, mengelola sumber daya secara berkelanjutan, menciptakan peluang ekonomi baru, serta untuk mempromosikan Kalurahan Wonokerto sebagai destinasi wisata yang menarik.

- b. Pemerintah Daerah

Sebagai bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan yang tepat guna. Dengan memahami daya tarik wisata yang dimiliki, pemerintah dapat menyusun strategi pengembangan yang terarah, termasuk perbaikan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas bagi wisatawan

- c. Kementerian ATR/BPN

Sebagai bahan masukan sekaligus memberikan kontribusi bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan penataan akses reforma agraria.

3. Akademisi dan Peneliti

Sebagai referensi literatur ilmiah terkait eksplorasi fenomena antara reforma agraria dan pengembangan wisata. Penelitian ini juga membuka peluang kajian lanjutan tentang dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pengelolaan lahan berbasis pariwisata. Dengan demikian, penelitian ini menjadi referensi yang relevan untuk studi lebih mendalam di masa mendatang.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengembangan potensi wisata di Kalurahan Wonokerto telah berlangsung seiring dengan upaya penataan akses reforma agraria. Potensi wisata yang dimiliki oleh empat objek wisata di Kalurahan Wonokerto (Jakagarong, Sangurejo, Gondoarum, dan Tunggularum) menunjukkan peluang besar untuk dikembangkan melalui pendekatan eduwisata, agro wisata, dan wisata budaya. Namun, pengelolaan potensi tersebut masih memerlukan penguatan dalam bentuk pelatihan, inovasi program, pemasaran, dukungan infrastruktur, dan permodalan yang masih terbatas di beberapa padukuhan. Oleh karena itu, strategi pengembangan wisata ke depan perlu diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat, perluasan akses pemasaran, serta pemanfaatan lahan secara optimal agar tujuan reforma agraria, yaitu keadilan dan kesejahteraan, dapat tercapai.
2. *Stakeholder* yang terlibat meliputi Pemerintah Kalurahan Wonokerto, Pengelola wisata (Kelompok Sadar Wisata), Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, masyarakat lokal, masing-masing dengan peran yang saling melengkapi. Pemerintah Kalurahan Wonokerto bertindak sebagai fasilitator, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman menyediakan pelatihan dan promosi, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman mendukung melalui legalisasi dan penataan akses, pengelola wisata sebagai operasional lapangan atau pengembangan, sementara masyarakat menjadi pengguna dan penerima manfaat di lapangan. Kolaborasi antar *stakeholder* sangat menentukan keberhasilan penataan akses.
3. Kendala dan solusi pengembangan potensi wisata dalam kerangka penataan akses reforma agraria, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Pemahaman Pengelola terhadap Reforma Agraria

Pengelola desa wisata belum memahami secara menyeluruh substansi dan arah reforma agraria, meskipun tahap identifikasi subjek telah dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi lanjutan dan pendampingan intensif agar pengelola memahami konsep, objek, serta skema pemanfaatan tanah dalam kerangka penataan akses reforma agraria. Pemahaman yang utuh akan mendorong pengelolaan tanah wisata yang optimal dan sesuai regulasi.

b. Keterbatasan Kapasitas SDM

Kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata dan pemahaman terhadap reforma agraria masih rendah. Untuk mengatasinya, perlu diselenggarakan pelatihan terpadu yang mencakup manajemen wisata dan sosialisasi penataan akses. Pelatihan ini akan memperkuat keterampilan dan pengetahuan pengelola serta masyarakat, sehingga mereka mampu menjalankan program secara efektif dan berkelanjutan.

c. Partisipasi Masyarakat Rendah

Rendahnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata menjadi kendala tersendiri. Solusinya adalah dengan mengoptimalkan peran Pokdarwis sebagai wadah untuk mendorong partisipasi warga. Pokdarwis dinilai efektif dalam memfasilitasi gotong royong, pengorganisasian kegiatan, dan pemberdayaan masyarakat secara langsung.

d. Aksesibilitas Lokasi Wisata Terbatas

Jalan menuju objek wisata masih sempit, menanjak, dan belum memadai untuk kendaraan besar. Untuk itu, perlu dilakukan pelebaran jalan dan perbaikan jalur strategis. Upaya ini akan meningkatkan kenyamanan dan kemudahan akses bagi wisatawan, sekaligus memperluas jangkauan pasar wisata desa.

e. Fasilitas Umum yang Terbatas

Beberapa lokasi wisata belum memiliki fasilitas umum seperti toilet, ruang tunggu, tempat istirahat, dan area parkir yang kurang memadai. Penyediaan fasilitas yang sesuai dengan standar wisata akan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan, serta menciptakan citra positif terhadap destinasi.

f. **Minimnya Inovasi Pengelolaan Wisata**

Keterbatasan inovasi dari pengelola dapat menyebabkan wisata menjadi monoton dan kehilangan daya tarik. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan workshop inovasi berbasis potensi lokal secara berkala. Workshop ini akan menumbuhkan kreativitas pengelola dalam menciptakan produk wisata baru yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan pasar.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan melakukan analisis terhadap perkembangan pemanfaatan tanah desa pasca implementasi reforma agraria, termasuk evaluasi kinerja kelembagaan pengelola dalam jangka waktu tertentu. Hasil analisis mengenai kebutuhan pengembangan potensi pariwisata menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia sangat diperlukan melalui pelatihan yang sesuai dan terarah. Diharapkan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan institusi pendidikan dalam menyelenggarakan berbagai pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa wisata. Berikut beberapa jenis pelatihan yang disarankan meliputi:

1. Pelatihan Manajemen Desa Wisata dapat dilaksanakan dalam bentuk workshop manajemen strategis dan pelatihan kepemimpinan lokal yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas pengelola dalam

merancang visi, misi, program kerja, serta tata kelola kelembagaan desa wisata.

2. Pelatihan Pemandu Wisata Alam dan Budaya dilaksanakan dalam bentuk praktik lapangan dan simulasi pemanduan, serta materi interpretasi budaya lokal, yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Pariwisata (BPP) atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata untuk membekali peserta dengan sertifikat kompetensi pemandu wisata.
3. Pelatihan Outbound Facilitator (Pemandu Outbound) dilakukan melalui pelatihan berbasis praktik di alam terbuka seperti simulasi game, ice breaking, dan teknik fasilitasi tim, yang difasilitasi oleh lembaga pelatihan seperti Indonesian Outbound Trainers Association atau lembaga sejenis yang telah memiliki pengalaman nasional.
4. Pelatihan Pengelolaan Homestay Berstandar CHSE berbentuk pelatihan teknis tentang kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan homestay, dengan pendampingan praktik oleh fasilitator dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
5. Pelatihan Digital Marketing diberikan melalui kelas daring/luring tentang penggunaan media sosial, pembuatan konten promosi, dan strategi SEO, yang bisa diselenggarakan oleh program Google Gapura Digital atau melalui Dinas Kominfo setempat.
6. Pelatihan Inovasi Produk Wisata dan Paket Wisata Edukasi dapat dilaksanakan dalam bentuk lokakarya kurasi produk lokal dan penyusunan itinerary berbasis edukasi, yang melibatkan akademisi dari institusi seperti Universitas Gadjah Mada atau STP AMPTA Yogyakarta.
7. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Usaha Desa Wisata diselenggarakan oleh Kementerian Desa PDTT atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui kelas literasi keuangan, pencatatan usaha, hingga perencanaan kas kelompok wisata agar operasional dapat berjalan transparan dan berkelanjutan.

8. Pelatihan Safety & Emergency Handling Wisata Alam mencakup pelatihan pertolongan pertama, penanganan bencana alam, dan evakuasi wisatawan, yang dilatih langsung oleh petugas dari BASARNAS, PMI, atau lembaga rescue lokal yang memiliki kapabilitas di bidang keselamatan pariwisata.
9. Pelatihan Pembuatan Event dan Festival Wisata diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi atau Event Organizer (EO) lokal yang telah bersertifikasi. Bentuknya berupa pelatihan penyusunan konsep acara, promosi event, manajemen logistik, serta evaluasi kegiatan.
10. Pelatihan Public Speaking untuk Pemandu Wisata dilakukan dalam bentuk pelatihan intensif komunikasi efektif, teknik bicara di depan umum, serta improvisasi narasi wisata, yang difasilitasi oleh LSP Public Speaking Indonesia atau lembaga pelatihan komunikasi lokal.
11. Pelatihan Teknis IT untuk Promosi Digital diberikan dalam bentuk pelatihan pembuatan website, desain grafis promosi, dan manajemen konten digital, dengan dukungan dari akademisi pariwisata atau fakultas teknologi informasi dari perguruan tinggi terkait.

Pelatihan-pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola potensi wisata secara profesional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta sangat penting agar desa wisata dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel / Jurnal

- Adnan, Z. (2023). Analisis Strategi Pengembangan Desa Wisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Garut. *Jurnal Publik*, 17(01), 76–86. <https://doi.org/10.52434/jp.v17i01.183>
- Andina, S. A., & Aliyah, I. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wisatawan Dalam Mengunjungi Wisata Budaya Candi Borobudur. *Jurnal Cakra Wisata*, 22(3), 27–38.
- Anugrah, R. A., Olilingo, F. Z., & Akib, F. H. Y. (2024). Analisis Perkembangan Kawasan Wisata Taman Nasional Wakatobi Di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 138–146. <https://doi.org/10.37905/jsep.v1i3.23843>
- Ashaab, D., Yamin, E., Salma, F., Noor, J., Salsabila, I., Khairani, J. N., Manajemen, D., & Ilmu, F. (2024). Dampak Pariwisata dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wisata Karangrejo melalui Community Based Tourism (CBT). *Jurnal Nasional Pariwisata*, 14(2), 108–123.
- Asteriananda, M. (2022). Potensi Fisik Dan Aksesibilitas Wisata Kampung Sasirangan Sungai Jingah Banjarmasin. *Jurnal Teknika: Jurnal Teoritis Dan ...*, 5(2), 52–58. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JT/article/view/7649>
- Aulia, W., Santosa, I., Ihsan, M., & Nugraha, A. (2023). Pemanfaatan Paradigma Teknologi Tepat Guna dalam Merancang Produk: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Desain Indonesia*, 5(2), 70–88.
- Destiana, R., & Astuti, R. S. (2019). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Conference on Public Administration and Society*, 1(01).
- Fajri, I., Pujiriyani, D. W., & Christine, R. V. (2024). Reforma Agraria Perkotaan: Dampak Penanganan Akses Terhadap Aset Penghidupan Masyarakat Kampung Kenteng, Kota Surakarta, Jawa Tengah. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(2), 229–244. <https://doi.org/10.15575/jt.v7i2.32458>

- Feli Rabilla Putri, Indi Vhatika, Heri Yanto, Nurul Zukhrufa, & Maya Panorama. (2022). Pengaruh Pariwisata Terhadap Petumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2019-2021. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i1.913>
- Haryanto, M., & Lina, L. (2017). Diversifikasi Usaha Dan Manajemen Laba Dengan Pendekatan Conditional Revenue Model. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 302. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.200>
- Isa, A. H., & Anu, Z. (2024). Pelatihan Keterampilan Produktif untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat © 2024 Universitas Negeri Gorontalo Under the license CC BY-SA 4 . 0 Paradigma pembangunan nasional yang menjadikan desa sebagai sektor potensial dalam gerakan pembangunan. *Jurnal Sibermas*, 13(1), 94–111.
- Nurjanah, S., & Pramono, H. (2018). Pengembangan Potensi Pariwisata Pantai Pandansimo Kabupaten Bantul. *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 7(2), 92–105. <https://doi.org/10.21831/gm.v7i2.19096>
- Nurlinda, I. (2018). Perolehan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) Yang Berasal Dari Kawasan Hutan: Permasalahan Dan Pengaturannya. *Veritas et Justitia*, 4(2), 252–273. <https://doi.org/10.25123/vej.2919>
- Nurmaturokhmah, D. I., & Susetyo, C. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Kawasan Pariwisata Bahari di Gili Labak, Kabupaten Sumenep. *Jurnal Teknik ITS*, 6(1). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i1.22245>
- Oktaviani, D., Kaniawati, K., & Sukma, A. (2023). Implementation of Digital Campaign in Ranca Upas for Sustainable Tourism. *Kontigensi : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(2). <https://doi.org/10.56457/jimk.v11i2.443>
- Rela, I. Z. (2023). Pemetaan Sosial Dan Partisipasi Stakeholder Dalam Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Penyuluhan Dan Pengembangan Masyarakat*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.56189/jippm.v3i1.35478>

- Saputra, P. D. A. (2024). The Importance of Sustainable Tourism in Maintaining Environmental Balance. *Al Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 4(2), 207–217. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4613>
- Soebagyo, S. (2021). Strategi pengembangan pariwisata di Indonesia. *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 153–158.
- Suhendra, M. (2017). Penyediaan Infrastruktur Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(1), 41–46. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i1.97>
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria Di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57–64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>
- Sumanto, L. (2023). Dinamika Reforma Agraria Dalam Sejarah, Konsep Dan Implementasi. *Jurnal Hukum Nawasena Agraria*, 1(1), 39–48. <https://doi.org/10.25105/jhna.v1i1.16588>
- Sumarjiyanto, N. (2020). Beberapa masalah dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 7(2), 124–131.
- Tesaurus Bahasa Indonesia. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008. *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, 240.
- Utomo, S. (2021). Percepatan reforma agraria untuk mencapai keadilan. *Industry and Higher Education*, 3(1).
- Wahyuningsih, R., & Pradana, G. W. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. *Publika*, 323–334. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p323-334>
- Wondama, K. T., Barat, P., Tingginehe, A. M., & Waani, J. O., & Wuisang, C. E. V. (2019). Perencanaan Pariwisata Hijau di Distrik Roon. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 6(2), 511–512. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2014.25.1.1>
- Yoeti, O. A. (2008). Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. *Nature Methods*, 3.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang
Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Buku

Husin, A., Andriani, D. S., & Saputra, A. (2022). *Pengembangan Wisata*. Bening Media Publishing.

Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*. Gramasurya, 1.

Mulyani, S. R. (2021). *Metodologi Penelitian*. Widina Bhakti Persada Bandung.

Sumber Lainnya

BPN. (2023). *Laporan Akhir Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023*. *Laporan Akhir*.

PuskoMedia Indonesia. (2024). *Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan: Memperkuat Kemampuan Desa dalam Membangun dan Mengelola Jaringan Kerja Sama*. <https://www.puskomedia.id/blog/meningkatkan-kapasitas-kelembagaan-memperkuat-kapasitas-kelembagaan-desadalam-membangun-dan-mengelola-jaringan-kerjasama/>